



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Puguh Kompleks Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung B Praya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya

normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-Lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- 3) Piutang Pajak yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- 4) Piutang Retribusi yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- 5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- 6) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- 7) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk

Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat. Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan

penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

4) Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

2) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek yang mencerminkan kekayaan pemerintah yang bersifat lancar.

b) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai peraturan perundangan.

4) Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

5) Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**I. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)****1. Pendapatan**

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 sampai dengan berakhirnya Tahun 2021 diterima sebesar Rp 1.431.200,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00%
2	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	1,431,200.00	0.00%
	Jumlah	0.00	1,431,200.00	0.00%

Rincian Lain-lain PAD yang Sah yang diterima tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0.00	1,431,200.00	0.00%
	Jumlah	0.00	1,431,200.00	0.00%

2. Belanja

Anggaran Belanja Sekretariat Daerah yang tertuang dalam APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp 29.430.763.451,00. Adapun realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 mencapai Rp 28.992.984.608,00 atau 98,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp 437.778.843,00. Rincian dari realisasi belanja tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	27,197,176,348.00	26,845,476,408.00	98.71%
2	Belanja Modal	2,233,587,103.00	2,147,508,200.00	96.15%
	Jumlah	29,430,763,451.00	28,992,984,608.00	98.51%

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 26.845.476.408,00 atau 98,71% dari anggaran sebesar Rp 27.197.176.348,00. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	13,080,045,152.00	13,309,783,956.00	101.76%
2	Belanja Hibah	1,837,000,000.00	1,837,000,000.00	100.00%
3	Belanja Barang dan Jasa	12,280,131,196.00	11,698,692,452.00	95.27%
	Jumlah	27,197,176,348.00	26,845,476,408.00	98.71%

Realisasi belanja operasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 13.309.783.956,00 dari target anggaran sebesar Rp 13.080.045.152,00 atau 101,76% dari target belanja pegawai keseluruhan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	6,248,466,098.00	6,353,261,860.00	101.68%
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	636,551,155.00	638,817,870.00	100.36%
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	427,096,800.00	436,675,000.00	102.24%
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	95,072,200.00	94,435,000.00	99.33%
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	228,729,640.00	231,290,000.00	101.12%
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	410,036,246.00	411,707,700.00	100.41%
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19,789,991.00	19,731,055.00	99.70%

8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	93,431.00	93,360.00	99.92%
9	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4,119,087,541.00	4,235,476,331.00	102.83%
10	Belanja Honorarium	147,350,000.00	141,050,000.00	95.72%
11	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54,861,254.00	54,600,000.00	99.52%
12	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7,581,840.00	7,560,000.00	99.71%
13	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77,220,000.00	77,000,000.00	99.72%
14	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7,989,374.00	7,966,200.00	99.71%
15	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	119,100.00	119,100.00	100.00%
16	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	482.00	480.00	99.59%
17	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00%
	Jumlah	13,080,045,152.00	13,309,783,956.00	101.76%

2. Belanja Hibah

Belanja Hibah untuk Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 1.837.000.000,00. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 1.837.000.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,837,000,000.00	1,837,000,000.00	100.00%
	Jumlah	1,837,000,000.00	1,837,000,000.00	100.00%

Belanja Hibah berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :

NO.	VOL.	SATUAN	KETERANGAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	1	paket	BAZNAS [Belanja Hibah Uang]	500,000,000.00	500,000,000.00
2	1	paket	DMI [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00
3	1	paket	MA Al Ilham NW Selusuh Desa Masmas Kecamatan Batukliang Utara [Belanja Hibah Uang]	35,000,000.00	35,000,000.00
4	1	paket	MA Attamimy Beransak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00
5	1	paket	MA Darul Falah Batu Jangkih Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya [Belanja Hibah Uang]	35,000,000.00	35,000,000.00
6	1	paket	MA Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00
7	1	paket	MA Mambaul Ulum Orok Solong Desa Kabul Kec. Praya Barat Daya [Belanja Hibah Uang]	35,000,000.00	35,000,000.00
8	1	paket	MA Nurmadani Montong Lisung Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00

9	1	paket	Masjid Jami' Praya [Belanja Hibah Uang]	500,000,000.00	500,000,000.00
10	1	paket	MA Zaenul Musthafa NW Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah [Belanja Hibah Uang]	50,000,000.00	50,000,000.00
11	1	paket	MUI [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00
12	1	paket	SMK Nurul Azmi Batu Belek Desa Setuta Kecamatan Janapria [Belanja Hibah Uang]	100,000,000.00	100,000,000.00
13	1	paket	Yayasan Masjid Al Ishaq Batu Belek Desa Setuta Kecamatan Janapria [Belanja Hibah Uang]	20,000,000.00	20,000,000.00
14	1	paket	Yayasan Masjid Majalis Utthorihoh Bagek Rebak Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur [Belanja Hibah Uang]	30,000,000.00	30,000,000.00
15	1	paket	Yayasan Masjid Nurul Ijtihad Jali Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria [Belanja Hibah Uang]	10,000,000.00	10,000,000.00
16	1	paket	Yayasan Masjid Nurul Yaqin Kenyalu Desa Jango Kecamatan Janapria [Belanja Hibah Uang]	22,000,000.00	22,000,000.00
			TOTAL		1,837,000,000.00

3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 12.280.131.196,00 dan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 11.698.692.452,00 atau 95,27% yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Barang Pakai Habis	4,486,799,948.00	4,377,186,566.00	97.56%
2	Belanja Jasa Kantor	4,736,532,828.00	4,597,748,786.00	97.07%
3	Belanja Sewa Tanah	120,000,000.00	36,000,000.00	30.00%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	297,253,120.00	288,630,000.00	97.10%
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	406,696,300.00	406,550,000.00	99.96%
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9,000,000.00	8,900,000.00	98.89%
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	87,900,000.00	86,910,000.00	98.87%
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	223,800,000.00	223,800,000.00	100.00%
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	304,530,000.00	299,420,000.00	98.32%
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85,680,000.00	85,500,000.00	99.79%
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	831,939,000.00	598,047,100.00	71.89%
12	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	690,000,000.00	690,000,000.00	100.00%
	Jumlah	12,280,131,196.00	11,698,692,452.00	95.27%

b) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja modal sebesar Rp 2.147.508.200,00 dari anggaran sebesar Rp 2.233.587.103,00 atau 96,15% yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,764,250,000.00	1,695,000,000.00	96.07%
2	Belanja Modal Alat Kantor	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	160,189,815.00	146,220,200.00	91.28%
4	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,947,288.00	3,500,000.00	88.67%
5	Belanja Modal Alat Studio	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00%
6	Belanja Modal Komputer Unit	224,000,000.00	222,450,000.00	99.31%
7	Belanja Modal Peralatan Komputer	60,500,000.00	59,638,000.00	98.58%
	Jumlah	2,233,587,103.00	2,147,508,200.00	96.15%

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1,764,250,000.00	1,695,000,000.00	96.07%
	Jumlah	1,764,250,000.00	1,695,000,000.00	96.07%

2. Belanja Modal Alat Kantor

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%
	Jumlah	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%

3. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Mebel	53,332,216.00	52,443,200.00	98.33%
2	Belanja Modal Alat Pembersih	25,340,900.00	12,670,000.00	50.00%
3	Belanja Modal Alat Pendingin	73,399,989.00	72,998,000.00	99.45%
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8,116,710.00	8,109,000.00	99.91%
	Jumlah	160,189,815.00	146,220,200.00	91.28%

4. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3,947,288.00	3,500,000.00	88.67%
	Jumlah	3,947,288.00	3,500,000.00	88.67%

5. Belanja Modal Alat Studio

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00%
	Jumlah	18,800,000.00	18,800,000.00	100.00%

6. Belanja Modal Komputer Unit

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Personal Computer	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
2	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	209,000,000.00	207,450,000.00	99.26%
	Jumlah	224,000,000.00	222,450,000.00	99.31%

7. Belanja Modal Peralatan Komputer

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	60,500,000.00	59,638,000.00	98.58%
	Jumlah	60,500,000.00	59,638,000.00	98.58%

3. Surplus/Defisit

Dari penjabaran realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 di atas, maka dapat disimpulkan terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp 437.778.843,00 dari total anggaran belanja daerah yang tersedia yaitu sebesar Rp 29.430.763.451,00, atau jika dipersentasekan sebesar 1,49% dari total anggaran. Surplus atau kelebihan anggaran ini dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran baik itu realocation maupun refocussing anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19.

II. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Aset

a) Aset Lancar

Aset Lancar sampai dengan berakhirnya tahun 2021 terdiri dari :

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 340.633.492,00. Saldo kas ini disetor ke rekening Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2022.

2. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

4. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 9.988.000,00 dan Rp 3.933.000,00

Beban Dibayar Dimuka diperoleh dari pembayaran sewa collocation server pada pos Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang habis masa berlaku sewanya pada Bulan Maret 2022.

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	9,988,000.00	3,933,000.00
	Jumlah	9,988,000.00	3,933,000.00

5. Persediaan

Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 4.299.694,00 dan Rp 2.783.750,00. Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan stock opname yang dilakukan oleh petugas pengurus barang di masing-masing SKPD. Adapun rincian persediaan untuk Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	VOL.	SATUAN	KETERANGAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	6	buah	Amplop	25,000.00	150,000.00
2	27	rim	Kertas HVS F4	50,000.00	1,350,000.00
3	2	rim	Kertas HVS A4	50,000.00	100,000.00
4	5	buah	Map Ordener	25,000.00	125,000.00
5	85	buah	Map Biasa	1,000.00	85,000.00

6	0	buah	Map Snelhecter	8,500.00	0.00
7	2	buah	Box File	15,000.00	30,000.00
8	0	buah	Map Luccy	13,500.00	0.00
9	0	buah	Buku Expedisi	10,000.00	0.00
10	7	buah	Buku Agenda	28,000.00	196,000.00
11	0	botol	Catridge Canon 810	250000	0.00
12	0	botol	Catridge Canon 811	320,000.00	0.00
13	3	botol	Tinta Epson 664 Hitam	110,000.00	330,000.00
14	4	botol	Tinta Epson 664 Magenta	110,000.00	440,000.00
15	3	botol	Tinta Epson 664 Cyan	110,000.00	330,000.00
16	2	botol	Tinta Epson 664 Yellow	110,000.00	220,000.00
17	0	botol	Tinta e-print Canon Black	60,000.00	0.00
18	0	botol	Tinta e-print Canon Magenta	60,000.00	0.00
19	0	botol	Tinta e-print Canon Cyan	60,000.00	0.00
20	0	botol	Tinta e-print Canon Yellow	60,000.00	0.00
21	6	kotak	Bolpoin Biasa	27,500.00	165,000.00
22	0	botol	Tinta Stempel	12,000.00	0.00
23	0	botol	Lem Kertas Cair	5,000.00	0.00
24	0	buah	Staples Besar	65,000.00	0.00
25	10	buah	Staples Kecil	17,500.00	175,000.00
26	2	buah	Spidol Permanen	8,000.00	16,000.00
27	2	buah	Spidol Board Marker	7,000.00	14,000.00
28	0	buah	Isi Staples Besar	4,000.00	0.00
29	28	buah	Isi Staples Kecil	2,500.00	70,000.00
30	0	buah	Calculator Besar 12 Digit	172,000.00	0.00
31	2	buah	Gunting	10,000.00	20,000.00
32	0	buah	Pembuka Staples	7,500.00	0.00
33	1	buah	Pelubang Kertas Besar	45,000.00	45,000.00
34	0	buah	Carter	17,500.00	0.00
35	3	buah	Klip Kertas	2,000.00	6,000.00
36	1	buah	Isi Carter	6,000.00	6,000.00
37	0	buah	Buku Register Kecil	15,000.00	0.00
38	0	buah	Garisan Plastik	4,500.00	0.00
39	0	buah	Buku Kwitansi	10,000.00	0.00
40	0	buah	Buku Keluar-Masuk	17,500.00	0.00
41	4	kotak	Binder Klip No. 200	12,000.00	48,000.00
42	3	buah	Binder Klip No. 155	7,500.00	22,500.00
43	0	buah	Binder Klip No. 111	5,000.00	0.00
44	0	buah	Bak Stempel	7,500.00	0.00
45	0	buah	Post It 76x101mm	12,500.00	0.00
46	1	buah	Tip Ex	10,000.00	10,000.00
47	0	buah	Isolasi/Lakban Bening	12,000.00	0.00
48	1	buah	Post It Panah	9,000.00	9,000.00
49	0	buah	Pensil	4,000.00	0.00
50	1	buah	Buku Kwitansi Isi 100 Lembar	16,072.00	16,072.00
51	0	pak	Paper Clips No. 350	10,000.00	0.00
52	3	kotak	Paper Clips Size 5	9,386.00	28,158.00
53	24	pak	Isi Staples Kecil No. 10	2,500.00	60,000.00
54	12	pak	Isi Staples No. 3-1M	4,000.00	48,000.00
55	48	buah	Binder Clips No. 105	3,343.00	160,464.00
56	1	kotak	Binder Clips No. 111	5,000.00	5,000.00
57	1	kotak	Binder Clips No. 200	12,000.00	12,000.00
58	1	kotak	Binder Clips No. 155	7,500.00	7,500.00
			TOTAL		4,299,694.00

b) Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 151.350.771.572,72 dan Rp 144.465.829.511,72. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Tanah	134,090,374,554.00	127,993,368,554.00
2	Peralatan dan Mesin	22,468,393,089.50	20,139,359,562.50
3	Gedung dan Bangunan	14,481,033,220.00	13,931,463,220.00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	1,037,146,310.00	1,037,146,310.00
5	Aset Tetap Lainnya	1,417,980,647.04	1,417,980,647.04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(22,144,156,247.82)	(20,053,488,781.82)
	Jumlah	151,350,771,572.72	144,465,829,511.72

Mutasi Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
1	Tanah	9,144,500,000.00	3,047,494,000.00
2	Peralatan dan Mesin	2,461,369,800.00	132,336,273.00
3	Gedung dan Bangunan	1,247,140,000.00	697,570,000.00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	0.00	0.00
5	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	386,978,640.00	2,477,646,106.00
	Jumlah	13,239,988,440.00	6,355,046,379.00

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Jumlah Aset Tetap sebelum Penyusutan	173,494,927,820.54	164,519,318,293.54
2	Akumulasi Penyusutan	(22,144,156,247.82)	(20,053,488,781.82)
3	Jumlah Aset Tetap setelah Penyusutan	151,350,771,572.72	144,465,829,511.72

Mutasi aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 134.090.374.554,00 dan Rp 127.993.368.554,00
- Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 22.468.393.089,50 dan Rp 20.139.359.562,50
- Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 14.481.033.220,00 dan Rp 13.931.463.220,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 1.037.146.310,00 dan Rp 1.037.146.310,00
- Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 1.417.980.647,04 dan Rp 1.417.980.647,04
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00
- Akumulasi Penyusutan
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp -22.144.156.247,82 dan Rp -20.053.488.781,82

c) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 660.826.732,00 dan Rp 660.826.732,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga : Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20,000,000.00	20,000,000.00

2	Aset Tidak Berwujud : Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00
3	Aset Lain-lain : Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	640,826,732.00	640,826,732.00
	Jumlah	660,826,732.00	660,826,732.00

2. Kewajiban

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 4.176.233,00 dan Rp 56.133.124,67 yang terdiri dari :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

2) Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.979.166,67

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Sekretariat Daerah Tahun 2020 diperoleh dari pendapatan sewa lokasi ATM Bank NTB Syariah pada pos Uang Muka Penjualan Produk Pemda dari pihak III, yang untuk Tahun 2021 disesuaikan/dipindahkan ke BPKAD.

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	1,979,166.67
	Jumlah	0.00	1,979,166.67

4) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 4.176.233,00 dan Rp 54.153.958,00

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kekurangan pembayaran gaji ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 4.176.233,00 dan Rp 4.826.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	1,839,600.00	4,332,993.00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	261,184.00	493,066.00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	2,075,000.00	0.00
4	Beban Pembulatan Gaji ASN	449.00	841.00
	Jumlah	4,176,233.00	4,826,900.00

a. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 49.327.058,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)
1	Beban Tagihan Listrik	0.00	29,493,314.00
2	Beban Tagihan Air	0.00	501,890.00
3	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0.00	19,331,854.00
	Jumlah	0.00	49,327,058.00

5) Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00
- b) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

3. Ekuitas/Dana

Ekuitas/Dana per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 152.362.343.257,72 dan Rp 145.077.239.869,05

III. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

1. Pendapatan Operasional

Saldo Pendapatan Operasional pada Sekretariat Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.410.366,67 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Saldo (Rp)
1	Pajak Daerah	0.00
2	Retribusi Daerah	1,979,166.67
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
4	Lain-lain PAD yang Sah	1,431,200.00
	Jumlah	3,410,366.67

Retribusi Daerah diperoleh dari pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 yang terdiri dari :

No.	Uraian	Saldo (Rp)
1	Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,979,166.67
	Jumlah	1,979,166.67

Sedangkan rincian Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0.00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0.00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1,431,200.00
	Jumlah	1,431,200.00

2. Beban Operasional

Beban operasional pada Sekretariat Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp 28.935.636.188,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Saldo (Rp)
1	Beban/Belanja Operasi	26,788,127,988.00
2	Beban/Belanja Modal	2,147,508,200.00
	Jumlah	28,935,636,188.00

a) Beban/Belanja Operasi

Beban/belanja operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 27.485.497.739,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)
1	Beban Pegawai	13,309,133,289.00
2	Beban Hibah	2,534,570,000.00
3	Beban Barang dan Jasa	11,641,794,450.00
	Jumlah	27,485,497,739.00

b) Beban/Belanja Modal

Beban/belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.147.508.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,695,000,000.00
2	Belanja Modal Alat Kantor	1,900,000.00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	146,220,200.00
4	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3,500,000.00
5	Belanja Modal Alat Studio	18,800,000.00
6	Belanja Modal Komputer Unit	222,450,000.00
7	Belanja Modal Peralatan Komputer	59,638,000.00
	Jumlah	2,147,508,200.00

IV. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 145.077.239.869,05 dan Rp 148.883.290.723,03

2. Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) - LO per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp -28.596.728.308,33 dan Rp -29.714.694.523,50. Surplus/(Defisit) - LO ini merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos-pos luar biasa.

3. Koreksi Nilai Kas

Koreksi Nilai Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

4. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5. Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka

Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

6. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

7. Koreksi Nilai Investasi

Koreksi Nilai Investasi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

8. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 9.407.504.470,00 dan Rp -0,48

9. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

10. Koreksi Nilai Kewajiban

Koreksi Nilai Kewajiban per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

11. R/KPPKD

Nilai R/K PPKD per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 26.474.327.227,00 dan Rp 25.908.643.670,00

12. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 152.362.343.257,72 dan Rp 145.077.239.869,05



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Puguh Kompleks Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung B Praya

PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, serta praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Disamping itu, dalam penyusunan dan penyajiannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Praya, 01 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 19700504 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Puguh Kompleks Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung B Praya

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran serta Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah kami susun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 01 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA, S.T.,M.T.
NIP. 19700504 200003 1 007